

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Bandung, Refika Aditama, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta. 2006.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research : Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Yogyakarta, Gadjah Mada University. 2004.
- Hadjon, Philipus M, R.S Soemantri M, Sjachran Basah, Bagir Manan, HM. Laica M, J.B.J.M. Ien Berge, PJJ. Van Buuren, F.A.M. Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2011.
- Jarot, W.M. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 the Land Acquisition*. Yogyakarta. Buku Litera. 2016.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2017.
- Notoyudo. *Hak Sri Sultan Atas Tanah di Yogyakarta*. Yogyakarta. CV. Ombak. 1975.
- Nugraha, Safri. *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta. BPHN. 2007.
- Marbun, SF, *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta, UII Press, 2013.
- Rubaei, Achmad. *Hukum Agraris di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi*. Surabaya. Banyumedia Publishing. 2006.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang baik)*. Bandung. Mandar Maju. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2007.
- Suhady, Idup. *Dasar – Dasar Kepemerintahan yang Baik*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2001.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika. 2017.

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang – Undanga Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

C. SKRIPSI, TESIS, DAN/ATAU DISERTASI

Nur Solekhah, “Keabsahan Hak Penguasaan Tanah Desa Yang Bersertifikat Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020

Vito Ninggar, “Akibat Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Yang Belum Ada Serat Kekancingan Di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman”. Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2018.

D. INTERNET

Sigar Aji Poerana, “ Status Hukum Tanah Kasultanan Yogyakarta”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-tanah-kasultanan-yogyakarta-1t5e154165681a4/> (diakses 25 Juli 2024).

Lugas Subarkah, “Serahkan 1.159 Sertifikat SG-PAG, Sultan: Tanah Harus Dipelihara dengan Hukum yang Ketat”. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/12/01/510/1056765/serahkan-1159-sertifikat-sg-pag-sultan-tanah-harus-dipelihara-dengan-hukum-yang-ketat> (diakses 27 Juli 2024)